

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdal. *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015).
- Asmarudin, Imam. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah: Kajian Terhadap Peran Badan Legislasi Daerah*. (Bulakamba: Penerbit Diya Media Group, 2020).
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- . *Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi untuk Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis*. (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2007).
- Azhary. *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*. (Jakarta: UI Press, 1995).
- Basah, Sjahan. *Perlindungan Hukum terhadap Sikap-Sikap Administrasi Negara*. (Bandung: Alumni, 1992).
- Benda, Ernst. *Hubungan Antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung*. (Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung, 2005).
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Burlian. *Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang*. (Palembang: NoerFikri, 2014).
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Godin, R. E., Rein, M., dan M. Moran. *The Public and its Policies*. Dalam M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin (Eds.), *The Oxford Handbook of Public Policy*. (New York: Oxford University Press, 2006).
- Hamzah, Guntur. *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*. (Jakarta: Pusat Pendidikan Mahkamah Konstitusi, 2016).
- Haryadi, Dwi. *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. (Bangka Belitung: UBB Press, 2018).
- Huda, Ni'matul. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. (Yogyakarta: UII Press, 2005).

- Iskandar, Jusman. *Kapita Selekta Teori Administrasi Negara*. (Bandung: Puspaga, 2012).
- Islamy, M. Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Koesoemahatmadja, Djenal Hoesen. *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara, Jilid 1*. (Bandung: Penerbit Alumni, 1983).
- Lotulung, Paulus Effendi. *Hukum Tata Usaha Negara*. (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2009).
- Mahmud MD, Moh. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. (Jakarta: PT Rineka Cipta)
- Marbun, F. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2011).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke-8*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2005).
- Mashuri, Muhammad dan Istijab. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)*. (Pasuruan: Universitas Merdeka Pasuruan Fakultas Hukum, 2020).
- Maula, Delly dan Arif Nuhroho. *Kebijakan Publik: Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik*. (Serang: C AA Rizky, 2019).
- Muhtaj, Majda El. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2022, Cetakan ke-3*. (Jakarta: Kencana, 2005).
- Mujiburohman, Dian Arie. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. (Yogyakarta: STPN Press, 2022).
- Noah, Sidek Mohd. *Reka Bentuk Penyelidikan: Falsafah, Teori dan Praktis, Sebuah Buku Mesra Pengguna*. (Serdang: Universiti Putera Malaysia, 2002).
- Nugroho, Sigit Sapto. *Hukum Sumber Daya Alam Perspektif Keadilan Inter-Antar Generasi*. (Solo: Penerbit Taujih, 2019).

- Pramuji, Kadar dkk. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2023).
- Redi, Ahmad. *Hukum Pertambangan Indonesia*. (Bekasi: Gramata Publishing, 2014).
- Ridwan, H.R. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- _____. *Administrasi Negara, Edisi Revisi, Cetakan ke-13*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).
- Rusmadi. *Pengelolaan Migas dan Batubara yang Kompetitif Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dalam Rangka Pembangunan Nasional*. (Jakarta: Andi, 2007).
- Sadjijono. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008).
- Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan*. (Yogyakarta: UII Press, 2007).
- Sinamo, Nomensen. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1984).
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).
- Stroik, F.A.M. dan J.G. Steenbeek. *Inleiding in het Staat en Administratief Recht*. (Alphen aan den Rijn: Samson HD Tjeenk Willink, 1985).
- Sumardjono, Maria S.W. dkk. *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia: Antara yang Tersurat dan Tersirat*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011).
- Sumarsih, Ida. *Nominee Agreement dalam Usaha Pertambangan Minerba*. (Jakarta: Rajawali Garfindo, 2023).
- Sutedi, Adrian. *Hukum Pertambangan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Swasono, Sri Edi dkk. *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi: Membangun Sistem Ekonomi Nasional*. (Jakarta: UI Press, 1985).
- Thoha, Miftah. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

- Tjandra, Riawan. *Peradilan Tata Usaha Negara: Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa*. (Yogyakarta: Liberty, 2009).
- Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986).
- van Wijk, H.D. dan Willem Konijnenbelt. *Hoofdstukken van Administratief Recht*. (Lemma B.V., 1988).
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).
- Wiratno. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2009).
- Wulandari, Liestiarini. *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Perizinan*. (Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2018).
- Yunus, Moh. dan A.M. Azhar Aljurida. *Hitam Putih Kebijakan Publik di Indonesia, Cetakan Pertama*. (Indramayu: Adanu Abimata, 2021).

Jurnal:

- Adhari, Ade et al. "Peningkatan Pemahaman Jaksa Terhadap Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan." *Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Tahun 2021, hal. 27.
- Redi, Ahmad. "Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia." *Undang Jurnal Hukum*, Vol. 4, Tahun 2021, hal. 475.
- Wahyudi, Ahmad. "Implementasi Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Upaya Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(2), 2016, hal. 101-105.
- Haerul, Akib & Hamdan. "Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar." *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 2016, hal. 21-34.
- Marwan, Ali. "Upaya Administratif Sebagai Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan." *Grondwet: Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara*, Vol. 1 No. 2, 2022, hal. 82-91.
- Hasti, Armin. "Kewenangan BKPM dalam Mencabut Izin Usaha Pertambangan." *Jurnal Hukum dan Permata Sosial*, Volume 5, Tahun 2023, hal. 1197.

- Baherman. "Tinjauan Yuridis terhadap Upaya Administratif sebagai Syarat Formal Pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Analisis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif)." *Qiyas*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2020,
- Safitri, Erna Dwi & Sa'adah, Nabitatus. "Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3, no. 1 (2021): 34–45, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.34-45>.
- Jiwantara, Firzhal Arzhi. "Upaya Administratif dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi." *Jatiswara*, 2019, hal. 132.
- R.R, Fitri. "Kajian Yuridis Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Penetapan Kebijakan Rencana Pembangunan Nasional." *Restitusi*, Volume I Nomor 1, Januari – Juni 2019, hal. 44.
- Govinda Panjuwa "Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dalam Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan Menurut UU No.4 Tahun 2009" *Lex Privatum* Vol. VI/No. 5/Juli/2018, hal 69
- Sharon, Grace. "Teori Wewenang Dalam Perizinan." *Jurnal Law Reform Program Magister Hukum Universitas Diponegoro*. Volume II Nomor 2 Tahun 2021.
- Harahap, M. Syahnan. "Perbedaan Konsepsi Rechtstaat Dan The Rule Of Law Serta Perkembangannya Terhadap Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Hukum Dirgantara*. Vol. 4 No. 2 Tahun 2019.
- Putera, Hidayat Pratama. "Penilaian Terhadap Batal Atau Tidak Sahnya Suatu Keputusan Dan/Atau Tindakan Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum Peratun*. Vol. 3 No. 1 Februari 2020.
- Susrama, I. Nengah dan Sukma, Putu Angga Pratama. "Keputusan Fiktif Dalam Upaya Administratif Terhadap Keputusan Aparatur Sipil Negara." *Jurnal Hukum Saraswati*. Vol. 1 No. 1 Tahun 2019.
- Saputera, I. Putu Gede. "Penerapan Asas Hakim Aktif (Dominus Litis) Dalam Persidangan Di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan No. 1/G/2017/PTUN.Dps)." *Jurnal Preferensi Hukum*. Februari 2021.
- Chandra, Jerico Lavian. "Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. Tahun 2024.
- Purba, Jessica Angelina Anggraeni. "Batasan untuk Keamanan: Analisis Kebijakan Pembatasan Ekspor Nikel Indonesia Menggunakan Pendekatan Poskolonialisme." *Jurnal Hubungan Internasional*. Vol. 17 No. 1 Januari–Juni 2024.
- Syamsurmadin, Lisda. "Pengawasan Pemerintah Pusat Atas Kerusakan Lingkungan Pada Kegiatan Tambang Batu Bara." *Selisik*. Volume 9 Nomor 2 Tahun 2023.
- Dewa, Muhammad Jufri et.al. "Kebijakan Hukum Pengelolaan Pertambangan Berbasis Kesejahteraan Masyarakat." *Halu Oleo Legal Research*. April 2023.

- Winanrno, Nur Basuki. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
- Nurizkia. "Antinomi Hukum Pengaturan Penawaran WIUPK Dan IUPK Secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Ormas Keagamaan." *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS*. Tahun 2024.
- Ramli et.al. "Studi Kritis Terhadap Ragam Konsep Negara Hukum." *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*. Tahun 2019.
- Shidiq, Reby Muhammad et.al. "Rule Of Law dan Perubahan Hukum Menurut Aristoteles." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*. Tahun 2024.
- Putri, Rizkyana Zaffrindra. "Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara." *Jurnal Law Reform Program Magister Hukum Universitas Diponegoro*. Volume II Nomor 2 Tahun 2021.
- Arizona, Yance. "Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*. Volume 8 Nomor 3 Juni 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Termasuk Lembaran-Negara No. 104 tahun 1960. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)*.

_____, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831)*.

_____, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77)*.

_____, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)*.

_____, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)*

_____, *Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079)*.

_____, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).*

_____, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang 3 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525)*

_____, *Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanasn Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republkt Indonesia Nomor 6721)*

_____, *Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.*

_____, *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara*

_____, *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1629)*

_____. *Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 734)*

_____, *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor*

Mahkamah Agung, *Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003*

Surat peringatan dengan nomor B-1095/MB.07/DJB.T/2022, tanggal 14 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh kementerian Energi Sumber Daya Mineral tentang Pemberian Sanksi Administratif Peringatan Pertama bagi perusahaan yang belum memenuhi kewajiban

_____, peringatan dengan nomor B-70/MB.07/DJB.T/2022, tanggal 6 Januari 2022dikeluarkan oleh kementerian Energi Sumber Daya Mineral tentang Pemberian Sanksi Administratif Peringatan keua bagi perusahaan yang belum memenuhi kewajiban

_____, peringatan nomor B-736/MB.07/DJB.T/2021 dan bertanggal 6 September 2021 dikeluarkan oleh kementerian Energi Sumber Daya Mineral tentang Pemberian Sanksi Administratif Pertama bagi perusahaan yang belum memenuhi kewajiban

Sumber Internet Lainnya

Anonim “Minerba One Data Indoensia Jumlah Perizinan Berdasarkan Jenis Perizinan” <https://modi.esdm.go.id> 16 Juli 2024

Anonim, “Pemerintah Cabut 2.078 Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara” *Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral*, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemerintah-cabut-2078-izin-usaha-pertambangan-mineral-dan-batubara>, 06 Januari 2022

Chiva, Syarif, “Dari 2.078 IUP, Menteri Bahlil: Tim Satgas telah Mencabut 2.065 IUP” <https://nikel.co.id/2022/08/12/dari-2-078-iup-menteri-bahlil-tim-satgas-telah-mencabut-2-065-iup/>, 12 Agustus 2022

Edy Arsyad, “Bahlil Lahadalia Terseret Kasus Suap Izin Tambang, Pakar HTN Menilai Begini...” <https://fajar.co.id/2024/03/08/bahlil-lahadalia-terseret-kasus-suap-izin-tambang-pakar-htn-menilai-begini/>, 8 Maret 2024

Firda Dwi, “Pemerintah Batal Cabut IUP 585 Tambang, Ada Apa?” *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbciindonesia.com/news/20240319192420-4-523452/pemerintah-batal-cabut-iup-585-tambang-ada-apa> , 19 Maret 2024

Melynda Dwi Puspita “10 negara penghasil nikel terbesar di dunia, Indonesia pertama.” *Tempo*, <https://www.tempo.co/internasional/10-negara-penghasil-nikel-terbesar-di-dunia-indonesia-pertama--227645>, 19 Januari 2023

Ratih Ika Wijayanti, “Top 7 Negara Penghasil Timah Terbesar di Dunia, Indonesia Salah Satunya, <https://www.idxchannel.com/milenomic/top-7-negara-penghasil-timah-terbesar-di-dunia-indonesia-salahsatunya>, 13 juni 2023

Sony Budiarso Indonesia salah satu penghasil tambang terbesar di dunia makalah disampaikan pada Mining Talk bertajuk Natural Resource Management <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/2877-indonesia-salah-satu-penghasil-tambang-terbesar-di-dunia>, 18 Oktober 2019

Sugiharto Pratama, Pemerintah cabut 2.078 izin usaha pertambangan mineral dan batu bara <https://www.antaranews.com/berita/2628765/pemerintah-cabut-2078-izin-usaha-pertambangan-mineral-dan-batu-bara>, 22 Januari 2022.